

Analisis Efektifitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2020-2022

Paulus Peka Hayon^{1*} Lury Prasasca Chandra²

^{1,2} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus

*Korespondensi: pauluspeka@unmus.ac.id

Abstrak: Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke dengan tujuan menganalisis tingkat efektifitas realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2021 dan 2022 dan efisiensi belanja daerah tahun anggaran 2021 dan 2022 Pemerintahan Daerah Kabupaten. Metode analisis, sumber data adalah data sekunder, teknik analisisnya menggunakan rasio efektifitas dan rasio efisiensi, data yang diperoleh berupa data dokumentasi berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanjanya daerah tahun 2021 dan tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2021 secara keseluruhan dikatakan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten dalam tahun anggaran 2021 dapat memenuhi target pendapatan yang diterima dari berbagai sumber pendapatan daerah. Belanja daerah kurang efisien; hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam tahun anggaran 2021, menggunakan anggaran belanja kurang tepat tidak sesuai dengan yang dianggarkan atau tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Tahun anggaran 2022, realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan efektif; hal ini dapat dikatakan bahwa target pendapatan dari semua sektor hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Belanja daerah pada tahun anggaran 2022 cukup efisien; hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah pada tahun anggaran 2022, menggunakan anggaran belanja mendekati target belanja yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2021, dan tahun anggaran 2022 efektif perolehannya, sedangkan belanja daerah tahun anggaran 2021 kurang efisien, dan tahun anggaran 2022 cukup efisien berarti ada pengontrolan belanja sehingga pengalaman tahun anggaran 2021 kurang efisien tidak terulang lagi pada tahun anggaran 2022.

Kata Kunci: Efektifitas Realisasi Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah

Abstract: This study was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency of Merauke Regency with the aim of analyzing the level of effectiveness of regional revenue realization in the 2021 and 2022 fiscal years and the efficiency of regional expenditure in the 2021 and 2022 fiscal years of the Merauke Regency Government. The analysis method used secondary data, with the analysis technique employing effectiveness ratios and efficiency ratios. The data obtained consisted of documentary data in the form of reports on the realization of regional revenue and expenditure budgets for the years 2021 and 2022. The results of the study indicate that the realization of regional revenue in the 2021 fiscal year was overall effective. This indicates that the district government in the 2021 fiscal year was able to meet the revenue targets received from various regional revenue sources. Regional expenditure was inefficient; this

can be said because the district government in the 2021 fiscal year used the expenditure budget inappropriately, not in accordance with what was budgeted or not in accordance with what was stipulated. In the 2022 fiscal year, regional revenue realization was effective overall. This indicates that revenue targets from all sectors were almost achieved. Regional expenditure in the 2022 fiscal year was quite efficient; this indicates that the regional government in the 2022 fiscal year used the expenditure budget close to the established expenditure targets. Overall, the realization of regional revenue in the 2021 fiscal year and the 2022 fiscal year was effective, while regional expenditure in the 2021 fiscal year was less efficient, and in the 2022 fiscal year it was sufficiently efficient, meaning that expenditure control was implemented, so the less efficient experience of the 2021 fiscal year was not repeated in the 2022 fiscal year.

Keywords: Effectiveness of Revenue Realization and Efficiency of Regional Expenditure

1. Pendahuluan

Dalam setiap organisasi apapun pasti memerlukan anggaran baik anggaran pendapatan maupun anggaran belanja. Secara umum anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang (Purwanti dan Prawironegoro, 2013). Anggaran memaksa manajemen untuk merencanakan masa depan. Anggaran mendorong para manajer untuk mengembangkan arah umum bagi organisasi, mengantisipasi masalah dan mengembangkan kebijakan untuk masa depan (Mowen dan Mowen, 2006). Anggaran memberikan standar yang dapat mengendalikan penggunaan berbagai sumber daya organisasi dan memotivasi karyawan. Sebagai bagian terpenting dari sistem anggaran, pengendalian dicapai dengan membandingkan hasil akrual dengan hasil anggaran periodik. Perbedaan yang besar antara hasil akrual dengan yang direncanakan adalah bentuk umpan balik yang mengungkapkan bahwa sistem tersebut diluar kendali.

Anggaran sektor publik disusun membutuhkan proses atau tahapan-tahapan , mulai dari peencanaan, pengesahaan, pelaksanaan dan pelaporan dan pertanggungjawaban, (Mahmudi, 2013). Perencanaan anggaran dapat dilakukan melalui pendekatan *top down* dan *budget planning, bottom up*, atau kombinasi antara *top down* dan *budget planning*. Dalam perencanaan anggaran dengan pendekatan *top down*, rencana anggaran telah ditetapkan oleh organisasi atasannya, sedangkan unit organansasi di bawahnya tinggal melaksanakannya. Perencanaan anggaran dengan pendekatan *bottom up*, disebut juga anggaran partisipasi, unit kerja mengajukan usulan anggaran sedangkan manajemen atasannya mengevaluasi dan menyetujui usulan anggaran unit. Perencanaan anggaran sektor publik di Indonesia khususnya penyusunan RAPBN dan RAPBD, dilakukan dengan pendekatan anggaran partisipasi yaitu melibatkan unit kerja organisasi dan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran. Unsur *top down* masih ada namun tidak dominan terutama hal ini dilakukan dalam penentuan prioritas dan plafon anggaran serta penetapan kebijakan anggaran yang telah ditetapkan dari atas.

Tahapan proses penyusunan anggaran berikutnya adalah pengesahaan (*ratifikasi*), dimana pembahasan ditingkat komisi badan anggaran dan pembahasan ditingkat sidang paripurnah dewan. Setelah pembahasan dan disetujui oleh dewan maka anggaran di sahkan oleh dewan *legislative* untuk ditetapkan menjadi anggaran yang sah

dan nantinya akan dilaksanakan oleh *eksekutif*. Jika tidak disetujui maka pemerintah harus menggunakan anggaran tahun lalu sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Setelah anggaran disahkan oleh dewan *legislatif* maka anggaran tersebut dilaksanakan, dimana pengguna anggaran mengajukan permintaan pencairan anggaran berdasarkan rencana penarikan dana yang telah dituangkan dalam dokumen isian pelaksanaan anggaran (DIPA), untuk unit kerja di pemerintah pusat dan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) untuk pemerintah daerah.

Proses tahap terakhir dalam penyusunan anggaran sektor publik adalah melaporkan dan mempertanggungjawabkan realisasi anggaran yang dituangkan dalam **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)** dan **Laporan Operasional (LO)**. Laporan realisasi anggaran merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban presiden atau kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat dan masyarakat

Pada pemerintahan di daerah proses penyusunan anggaran atau tahapan-tahapan penyusunan anggaran daerah dimulai dengan: 1) penyusunan kebijakan umum APBD (KUA), 2) penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), 3) penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD; 4) penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD; 5) penyampaian dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APB; 6) evaluasi APBD dan 7) penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Berdasarkan hasil evaluasi APBD, pemerintah daerah menetapkan APBD menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD (Haryanto, Sahmuddin dan Arifuddin, 2007).

Proses penyusunan telah sampai pada tahap terakhir yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Menurut Mahmudi (2013), bahwa laporan realisasi anggaran merupakan alat transparansi dan akuntabilitas publik yang dapat mengindikasikan kualitas pengelolaan keuangan publik. Sedangkan menurut Haryanto, Sahmuddin dan Arifuddin (2007), menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan neraca, laporan realisasi anggaran menduduki prioritas yang lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum disyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas.

Sahmuddin dan Arifuddin (2007), bahwa Informasi yang disampaikan melalui LRS tersebut pihak pembaca akan membuat analisis tentang sejauh mana efektifitas dan efisiensi realisasi pendapatan yang masuk ke kas pemerintah daerah dan sejauh mana efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah. Sedangkan menurut Mahmudin (2013), Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang pendapatan, belanja, transfer, Surplus/defisit anggaran, pembiayaan penerimaan, pembiayaan pengeluaran dan pembiayaan neto serta sisah lebih/kurang pembiayaan anggaran (Chambuk, 2024).

Fenomena umum yang sering terjadi bahwa penerimaan pendapatan daerah kadang tidak tercapai sesuai dengan perencanaan sehingga berujung pada pengeluaran juga tidak bisa dipenuhi seluruhnya karena penerimaan daerah tidak tercapai dari semua

sumber pendapatan. Maka penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis sejauh mana efektivitas realisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja daerah tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022

2. Metode

Merode merupakan strategi atau alat yang digunakan oleh peneliti berdasarkan kebutuhan pengumpulan data, tipe data yang dikumpulkan dimana mengumpulkan data, dan bagaimana cara menganalisis data. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan sebagai pelengkap adalah metode kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif (Prasetyo dan Jannah, 2013).

Dalam penelitian kualitatif akan terjadi tiga kemungkinan terhadap masalah, yakni masalah yang dibawah oleh peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitiannya sama; masalah penelitian yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian menjadi berkembang artinya masalahnya diperluas dan diperdalam masalah yang telah disiapkan, sedangkan masalah yang terakhir adalah masalah yang dibawah peneliti setelah memasuki penelitian semuanya berubah total (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini masalah yang dibawah peneliti sejak awal tidak ada perubahan sampai data direduksi, dipaparkan dan menarik kesimpulan. Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian melainkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini fokus pada laporan keuangan dalam hal ini laporan realisasi anggaran dan pendapatan tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2021. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan dan Misbahuddin, 2013). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data dokumentasi.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2016). Data bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Pada penelitian ini dokumentasi yang diambil adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran tahun 2022. Data penelitian setelah didapat maka data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data di lapangan model Miles and Huberman (Sugiyono, 2016).

Model analisis data penelitian kualitatif ini ada tiga aktivitas yang dilalui adalah: 1) data *reduction* (reduksi data); yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema polanya; 2) data *display* (penyajian data); yaitu penyajian data setelah direduksi berupa gambar, tabel atau narasi; 3) *conclusion drawing/verification*; yaitu kesimpulan akhir dari penelitian kualitatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian kualitatif (Miles and Huberman; 1984, dalam Sugiyono, 2014 dan Sugiyono, 2016). Penelitian ini data diolah dengan menggunakan rasio-rasio aktivitas yakni:

1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah; yakni membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan yang dianggarkan akan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan sumber asli daerah sesuai yang diprogramkan. Jika hasil perbandingan rasio semakin tinggi maka semakin efektif target penerimaan sumber pendapatan asli daerah demikian pula sebaliknya. Rumus perhitungan tingkat efektifitas pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Kriteria	Presentase (%)
Sangat Efektif	> 100
Efektif	90 – 100
Cukup Efektif	80 – 90
Kurang Efektif	60 – 80
Tidak Efektif	< 60

Sumber : (Mahsun, 2013)

2. Rasio Efisiensi Belanja Daerah; yakni perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja; untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah pemerintah. Penggunaan anggaran efisien jika prosentase rasionalnya kurang dari 100% dan jika prosentase rasionalnya melebihi 100% maka ada indikasi kemungkinan penggunaan anggaran kurang sesuai yang dianggarkan (Mahmudi, 2007).

Rumus untuk menghitung tingkat efisiensi belanja daerah dapat dilihat di bawah ini:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Tingkat Efisiensi Belanja Daerah Secara Umum

Kriteria	Presentase (%)
Tidak Efisien	> 100
Kurang Efisien	90 – 100
Cukup Efisien	80 – 90
Efisien	60 – 80
Sangat Efisien	< 60

Sumber : (Mahsun, 2013)

3. Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Pendapatan Daerah

Efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan sebuah organisasi sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan oleh organisasi tersebut. Efektifitas menggambarkan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan organisasi.

Kontribusi *output* semakin besar dihasilkan maka pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan semakin sukses kinerja pemerintah daerah (Mardiasmo , 2017). Kriteria tingkat efektifitas pendapatan asli daerah dapat dihitung dengan rasio efektifitas seperti berikut ini:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Abdulah, 2007

Tabel 3. Kriteria Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Kriteria	Presentase (%)
Sangat Efektif	> 100
Efektif	90 – 100
Cukup Efektif	80 – 90
Kurang Efektif	60 – 80
Tidak Efektif	< 60

Sumber : Mahsun, 2013

2. Efisiensi Belanja Daerah

Efisiensi adalah pencapaian maksimum *output* dan penggunaan terendah *inputnya*; atau dengan kata lain. Efisiensi adalah perbandingan antara *output/input* dengan target yang telah ditetapkan. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. (Mardiasmo (2018)). Kriteria tingkat efisiensi belanja daerah dapat diketahui dengan menggunakan rumus perhitungan rasio efektifitas belanja sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, (2007)

Tabel 3. 2 Kriteria Tingkat Efisiensi Belanja Daerah

Kriteria	Presentase (%)
Tidak Efisien	> 100
Kurang Efisien	90 – 100
Cukup Efisien	80 – 90
Efisien	60 – 80
Sangat Efisien	< 60

Sumber : Mahsun, (2013)

3. Analisis Efektifitas Realisasi Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2021

Pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021 telah melakukan kegiatan untuk memenuhi anggaran dan belanja daerah seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

Keterangan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Selisih
PENDAPATAN LRA	1.899.901.797.617,00	1.902.181.526.917,86	100,12	-2.279.729.300,86
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	164.372.965.939,00	141.760.756.193,86	86,24	22.612.209.745,14
Pendapatan Transfer	1.711.267.126.247,00	1.725.294.547.374,00	100,82	-14.027.421.127
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24.261.705.431,00	35.126.223.350,00	144,78	-10.864.517.919
BELANJA	1.975.119.389.370,26	1.783.570.416.177,58	90,3	191.548.973.192,68
Belanja Operasional	1.357.900.682.843,86	1.182.670.968.322,58	87,1	175.229.714.521,28
Belanja Modal	252.257.032.536,40	236.622.749.365,00	93,8	15.634.283.171,04
Belanja Tak Terduga	684.975.500,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER	364.276.698.490,00	364.276.698.490,00	100	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	364.276.698.490,00	364.276.698.490,00	100	0,00
PEMBIAYAAN DAERAH	36.430.585.318,00	31.029.748.173,72	85,17	5.400.837.144,28
Penerimaan Pembiayaan	41.430.585.318,00	33.691.930.273,72	81,32	7.738.655.044,28
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	2.662.182.100,00	53,24	2.337.817.900

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintahan Kabupaten

a. Analisis Efektifitas Pendapatan Daerah Tahun 2021

Dari data tersebut di atas, maka untuk mengetahui efektifitas pendapatan daerah, dapat diketahui melalui rasio efektifitas sebagai berikut:

Pendapatan Daerah Tahun 2021

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Penerimaan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Target Penerimaan}}{1.902.181.526.917,86} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{1.902.181.526.917,86}{1.899.901.797.617,00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 100,12\%$$

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{141.760.756.193,86}{164.372.965.939,00} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas = 86,24%

Pendapatan dari dana Transfer Tahun 2021

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{1,725,294,547,374.00}{1,711,267,126,247.00} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas = 100,82%

Pendapatan Daerah yang didapat dari pendapatan lain-lain Tahun 2021

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{35,126,223,350.00}{24,261,705,431.00} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas = 144,78%

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas pendapatan daerah pada tahun 2021, menunjukkan bahwa rasio efektifitas pendapatan daerah semua sektor berada di atas 100%. Jika dilihat dari kriteria tingkat rasio efektifitas pendapatan daerah maka tingkat efektifitas pendapatan daerah berada pada tingkat sangat efektif yakni $> 100\%$. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah tingkat kabupaten dapat memenuhi target anggaran pendapatan yang telah disepakati bersama dewan legislatif pada tahun 2021.

b. Analisis Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2021

Belanja daerah dapat dikatakan efisien atau tidak efisien jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan data pada tabel 3.1 maka rasio efisiensi belanja daerah dapat dilihat pada hasil perhitungan berikut ini:

Belanja Daerah Tahun 2021

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1,783,570,416,177.58}{1,975,119,389,370.26} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi = 90,03%

Belanja Operasional

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1,182,670,968,322.58}{1,357,900,682,843.86} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi = 87,01%

Belanja Modal

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{236,622,749,365.00}{252,257,032,536.40} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi = 93,08%

Belanja Tak Terduga

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{0,00}{684,975,500.00} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi	=	0,00%
Belanja dari dana Transfer		
Rasio Efisiensi	=	$\frac{364,276,698,490.00}{364,276,698,490.00} \times 100\%$
Rasio Efisiensi = 100%		
Penerimaan Pembiayaan		
Rasio Efisiensi	=	$\frac{33,691,930,273.72}{41,430,585,318.00} \times 100\%$
Rasio Efisiensi	=	81,32%
Pengeluaran Pembiayaan		
Rasio Efisiensi	=	$\frac{2,662,182,100.00}{5,000,000,000.00} \times 100\%$
Rasio Efisiensi	=	53,24%

Berdasarkan kriteria tingkat efisiensi belanja dan dibuktikan dengan hasil perhitungan rasio efisiensi tersebut maka dapat dikatakan bahwa untuk belanja pemerintah daerah secara keseluruhan kurang efisien karena hasil perhitungan rasio sebesar 90,03%. berada di antara 90-100%. Secara khusus belanja modal juga kurang efisien karena hasil perhitungan rasio sebesar 93,08%, berada diantara 90-100%. Penggunaan dana transfer juga kurang efisien karena hasil perhitungan rasio sebesar 100%, berada diantara 90-100%. Hasil perhitungan rasio belanja tak terduga menimbulkan pertanyaan apakah betul tidak ada belanja tak terduga? Sedangkan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan termasuk transaksi temporer sehingga sebenarnya tidak masuk hitungan efisiensi belanja daerah.

4. Analisis Efektifitas Realisasi Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2022

Data hasil penelitian realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

Keterangan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Selisih
PENDAPATAN AN LRA	2,174,895,529,495.00	2,214,726,510,742.91	101.83	-39,830,981,247.91
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	197,658,047,927.00	191,825,756,459.91	97.05	5,832,291,467.09
Pendapatan Transfer - Transfer	1,976,341,119,178.00	1,958,442,761,450.00	99.09	17,898,357,728.00

Pemerintah Pusat				
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	896,362,390.00	64,457,992,833.00	7191.06	-63,561,630,443.00
BELANJA	2,193,330,950,080.00	1,967,611,955,377.29	89.71	225,718,994,702.71
Belanja Operasional	1,621,262,501,464.00	1,490,362,261,805.99	91.93	130,900,239,658.01
Belanja Modal	564,890,498,089.00	472,680,223,351.30	83.68	92,210,274,737.07
Belanja Tak Terduga	7,177,950,527.00	4,569,470,220.00	63.66	2,608,480,307.00
TRANSFER	327,980,438,329.00	320,308,271,928.00	97.66	7,672,166,401.00
Belanja Bantuan Keuangan	327,980,438,329.00	320,308,271,928.00	97.66	7,672,166,401.00
PEMBIAYAAN	346,415,858,914.00	347,415,858,914.00	100.29	-1,000,000,000.00
Penerimaan Pembiayaan	349,640,858,914.00	349,640,858,914.00	100.00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	3,225,000,000.00	2,225,000,000.00	68.99	1,000,000,000.00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tahun 2022

Dari data tersebut di atas dapat dihitung rasio efektifitas pendapat daerah dan rasio efisiensi belanja daerah tahun 2022

a. Analisis Efektifitas realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022

Realisasi pendapatan daerah dapat dikatakan efektif atau tidak efektif pada tahun 2022 dapat dilihat melalui perhitungan rasio efektifitas berikut ini:

Pendapatan Daerah Tahun 2022

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{2,214,726,510,742.91}{2,174,895,529,495.00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 101,83\%$$

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{191,825,756,459.91}{197,658,047,927.00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 97,05\%$$

Pendapatan Transfer Tahun 2022

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{1,958,442,761,450.00}{1,976,341,119,178.00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 99,09\%$$

Pendapatan Daerah lain-lain Tahun 2022

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{64,457,992,833.00}{896,362,390.00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 7191,06\%$$

Hasil perhitungan rasio efektifitas diketahui bahwa rasio efektifitas pendapatan daerah pada tahun 2022 sebesar 101,83%, berada diantara prosentase 90-100% karena kelebihan 1,83% tidak signifikan maka prosentase sebesar 101,83% termasuk tingkat efektifitas efektif. Sedangkan pendapatan asli daerah, dan dana transfer dengan masing-masing prosentase 97,05% dan 99,09% berada pada tingkat efektifitas 90-100% sehingga masuk pada tingkat efektifitas efektif. Pendapatan lain-lain pada tahun 2022 prosentase efektifitasnya melampaui batas standar pengukuran efektifitas karena dana untuk biaya operasional sekolah masuk dalam pengelolaan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. Analisis Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2022

Dari data realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 di atas maka dapat dihitung rasio efisiensi belanja daerah tahun 2022, hasil perhitungan akan menunjukkan belanja mana yang efisien dan belanja mana yang tidak efisien. Hasil perhitungan rasio efisiensi belanja daerah tahun 2022 sebagai berikut:

Belanja Daerah Tahun 2022

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1,967,611,955,377.29}{2,193,330,950,080.00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 89,71\%$$

Belanja Operasi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1,490,362,261,805.99}{1,621,262,501,464.00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 91,93\%$$

Belanja Modal

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{472,680,223,351.30}{564,890,498,089.00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 83,68\%$$

Belanja Tak Terduga

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{4,569,470,220.00}{7,177,950,527.00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 63,66\%$$

Belanja Transfer

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{320,308,271,928.00}{327,980,438,329.00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 97,66\%$$

Penerimaan Pembiayaan

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{349,640,858,914.00}{349,640,858,914.00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 100\%$$

Pengeluaran Pembiayaan

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{2,225,000,000.00}{3,225,000,000.00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 68,99\%$$

Hasil perhitungan rasio efisiensi belanja daerah tahun 2022 dapat dikatakan bahwa rasio efisiensi belanja daerah sebesar 89,71% berada diantara tingkat rasio efisiensi 80-90% berarti masuk dalam rasio cukup efisien, belanja modal juga masuk dalam tingkat efisiensi cukup efisien karena rasio efisiensinya sebesar 86,68%. berada diantara tingkat rasio efisiensi 80-90% berarti cukup efisien. Sedangkan belanja operasi, belanja dari dana transfer dan penerimaan pembiayaan kurang efisien karena masing-masing besaran prosentase 91,93%, 97,66% dan 100% berada diantara kriteria tingkat efisiensi belanja daerah 90-100% sehingga ketiga jenis belanja daerah tersebut masuk dalam belanja pemerintah daerah yang kurang efisien pada tahun 2022. Dari beberapa belanja daerah tersebut hanya satu jenis belanja daerah masuk dalam kriteria efisien dengan prosentase penilaian efisiensi 68,99%, berada pada kriteria penilaian rasio efisiensi 60-80% sehingga belanja daerah jenis pengeluaran pembiayaan masuk dalam kriteria penilaian efisien.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2021 secara keseluruhan dikatakan efektif dibuktikan dengan hasil perhitungan rasio efektifitas mencapai 100,12%, berada pada kriteria penilaian efektifitas dengan prosentase 90-100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten dalam tahun anggaran 2021 dapat memenuhi target pedapan yang diterima dari berbagai sumber pendapatan daerah.

Tahun anggaran 2021, belanja daerah kurang efisien dibuktikan dengan hasil perhitungan rasio efisiensi belanja daerah mencapai 90,03%, berada pada kriteria penilaian efisiensi belanja daerah 90-100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam tahun anggaran 2021, menggunakan anggaran belanja kurang tepat tidak sesuai dengan yang dianggarkan atau tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Secara lebih

rincih dapat disimpulkan bahwa salah satu belanja daerah adalah belanja modal juga kurang efisien; hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan rasio efisiensi mencapai 93,08%, berada diantara 90-100% sehingga masuk dalam kategori atau kriteria kurang efisien. Hal ini artinya belanja modal pada tahun anggaran 2021 melampaui target yang telah ditetapkan. Demikian pula belanja daerah yang berasal dari dana transfer digunakan kurang tepat pada sasarnya.

Tahun anggaran 2022, realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan efektif, dibuktikan dengan hasil perhitungan rasio efekfitas pendapatan mencapai 101,83%, (kelebihan hanya 1,83%) sehingga dapat dikatakan efektif. . Hal ini dapat dikatakan bahwa target pendapatan dari semua sektor hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Belanja daerah pada tahun anggaran 2022 cukup efisien dibuktikan dengan hasil perhitungan rasio efisiensi belanja daerah 89,71%; berada pada kriteria cukup dengan besaran prosentase 80-90%. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah pada tahun anggaran 2022, menggunakan anggaran belanja mendekati target belanja yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2021, dan tahun anggaran 2022 efektif perolehannya, sedangkan belanja daerah tahun anggaran 2021 kurang efisien, dan tahun anggaran 2022 cukup efisien berarti ada pengontrolan belanja sehingga pengalaman tahun anggaran 2021 kurang efisien tidak terulang lagi pada tahun anggaran 2022.

Daftar Pustaka

- Badrudin, R. (2017). Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Chambuk , M. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah . *Papsel Economic Journal*, 1(3), 25–35.
<https://doi.org/10.63185/pej.v1i3.79>
- Fatimah, S. (2024). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Job Relevant Information Terhadap Kinerja Manajerial . *Papsel Economic Journal*, 2(1).
<https://doi.org/10.63185/pej.v2i1.134>
- Halim Abdul dan Iqbal Muhammad, Pengelolaan Keuangan Daerah, Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan
- Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 2. Jakarta. Salemba Empat.
- Hansen R. Don dan Mowen M. Maryanne, 2006, Management Accounting, edisi 7, Jakarta, Salemba Empat
- Haryanto, Sahmuddin dan Arifuddin, 2007, Akuntansi Sektor Publik, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hasan Iqbal, 2011, Pokok-Pokok Materi Statistik 1 Edisi Kedua1 (Statistik Deskriptif), Jakarta, Bumi Aksara
- Hayon, P. P., & Fitry, R. N. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Berimbang Terhadap Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi

Papua. *Musamus Accounting Journal*, 6(2), 39-48.
<https://doi.org/10.35724/maj.v6i2.6168>

Indraswari, A. F. P., Romdioni, A. N., & Asrudi. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi. *Papsel Economic Journal*, 1(1), 1-17.
<https://doi.org/10.63185/pej.v1i1.1>

Mahmudi, 2013, Akuntansi Sektor publik, cetakan kedua, Yogyakarta, UII Press
Mahsun, Muhamad. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta. Penerbit BPFE.

Mardiasmo. (2017). Akuntansi Sektor Publik Edisi IV. Yogyakarta. Andi.

Mandawa, M. M. S. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keperilakuan Organisasi Terhadap Penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *Musamus Accounting Journal*, 6(1), 43-53. <https://doi.org/10.35724/maj.v6i1.6262>

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru. Yogyakarta. Andi.

Misbahuddin dan Hasan Iqbal, 2013, Analisis Data Penelitian dengan Statistik edisi ke-2, Jakarta, Bumi Aksara

Prasetyo Bambang dan Jannah Miftahul Lina, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta,PT RajaGrafindo Persada

Purwanti Ari dan Prawironegoro Darsono, Akuntansi Manajemen Edisi 3 Revisi, Jakarta, Mitra Wacana Media

Rahmawati , L. A., & Wati, C. H. S. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. *Musamus Accounting Journal*, 6(2), 1 - 9.
<https://doi.org/10.35724/maj.v6i2.6084>

Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D cetakan ke 23, Bandung, Alfabeta

Sujarweni Wiratna V, 2015, Akuntansi Sektor Publik Teori Konsep dan Aplikasi, Yogyakarta Pustaka Baru Press

Unmus (2022). Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.

<https://www.unmus.my.id/2014/03/karakteristik-kualitatif-laporan.html>

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yaniangga, P. (2024). Analisis Partisipasi Dan Transparansi Penyusunan Anggaran Pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Merauke. *Papsel Economic Journal*, 1(3), 36-54. <https://doi.org/10.63185/pej.v1i3.80>